

**Judul** : Pansel KPK adalah kunci  
**Tanggal** : Kamis, 25 Juli 2024  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 1

## Pansel KPK Adalah Kunci

*Pansel KPK jangan menjadikan hasil investigasi masyarakat terkait rekam jejak kandidat capim dan Dewas KPK sekadar pemenuhan syarat formalitas.*

**SRI UTAMI**  
ami@mediaindonesia.com

**P**ANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan membuat terobosan sehingga mereka dapat melahirkan komisioner yang telah selesai dengan diri mereka untuk memimpin lembaga antirasuah itu.

"Saya berharap pansel dapat memilih capim dan Dewas KPK yang berintegritas dan telah selesai dengan diri me-

reka. Artinya, mereka sudah tidak repot lagi dengan harta," ujar anggota Komisi III DPR Santoso di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pansel kini menjadi kunci dalam menyeleksi kandidat yang bermasalah. "Pimpinan KPK harus khusus. Artinya seleksinya tidak boleh sembarangan dan harus betul betul ketat. Harus ada terobosan baru yang bisa mengunci capim KPK agar tidak korupsi atau terlibat masalah tercela lainnya."

Peneliti Pusat Studi Anti-

korupsi Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai keberanian pansel bisa dimulai dengan mencoret kandidat yang bermasalah.

"Pansel harus punya perspektif. Kalau misalnya rezim KPK sekarang bermasalah, semua harusnya ada kekhususan. Mereka memang dibolehkan untuk mendaftar, tapi kalau bermasalah, pansel punya otoritas. Kalau mereka (peserta capim KPK) saat ini sudah dianggap gagal, harusnya coret saja," ungkapnya.

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengaku se-

dang menginvestigasi rekam jejak para capim dan Dewas KPK.

"Kami lakukan proses investigasi rekam jejak peserta yang lulus administrasi ini. Nanti kami sampaikan ke publik dan pansel," jelasnya.

Praswad menerangkan proses tersebut sudah pernah dilakukan pada seleksi capim KPK 2019. Hanya, pansel saat itu mengabaikan hasil investigasi dan justru memilih pimpinan yang memiliki masalah serius pada rekam jejak

### Hasil Seleksi Administrasi Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK Masa Jabatan 2024-2029

	Capim	Dewas
■ Jumlah pendaftar	318	207
■ Jumlah yang lulus	236	146

### Latar Belakang Capim dan Dewas yang Lolos Seleksi Administrasi

- Akademisi: **50 orang**
- Auditor: **39 orang**
- Praktisi: **36 orang**
- PNS: **26 orang**
- Hakim: **17 orang**
- Anggota Polri: **16 orang**
- Pihak swasta: **12 orang**
- Jaksa: **11 orang**
- LSM: **8 orang**
- Pegawai BUMN: **6 orang**
- Anggota TNI: **3 orang**
- Lainnya: **8 orang**

### Nama-Nama Internal KPK yang Lolos Seleksi Administrasi

- Nurul Gufron (Wakil Ketua KPK)
- Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK)
- Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan dan Monitoring)
- Karyoto (Deputi Penindakan dan Eksekusi)
- Lili Pintauli Siregar (mantan Wakil Ketua KPK)
- Sujanarko (Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomis dan Instansi)
- Asep Guntur Rahayu (Direktur Penuntutan)
- Setiadi (Direktur Pengawasan Internal)

Sumber: KomersingKPK.1000.011

mereka.

"Pada 2019 sudah pernah kami lakukan, tapi upaya kami tidak didengarkan. Kami lakukan skrining administrasi dan rekam jejak."

Dia berharap masukan dari masyarakat tidak sekadar dipandang untuk pemenuhan syarat formalitas. "Jangan sampai nanti proses penyempurnaan aspirasi masyarakat hanya formalitas. Seburuk apa pun informasi yang kami dapatkan jangan sampai ter-

jadi lagi seperti Firli Bahuri," tukasnya.

Pansel Capim dan Dewas KPK mengumumkan sebanyak 318 orang lolos seleksi administrasi. Seleksi itu merupakan tahapan awal. Dari jumlah itu, sebanyak 236 ialah nama calon Dewas KPK.

Dalam daftar nama itu, ada mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan mantan juru bicara KPK yang

juga politikus PDIP Johan Budi SP.

Selain itu, delapan nama dari internal KPK lolos dalam seleksi administrasi, termasuk Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Nurul Gufron. Mereka ialah komisioner pada masa kepemimpinan Firli Bahuri. Firli mengajukan pengunduran diri setelah mendapat sanksi etik berat oleh Dewas KPK. Pada 28 Desember 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan presiden (keppres) terkait dengan pemberhentian Firli.

Gufron dan Johanis Tanak sama sama sempat diperiksa oleh Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik.

### Mundur dari PDIP

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi berencana mundur dari wakil rakyat serta

kader PDIP. "Saya berencana mundur dari DPR dan PDIP, tapi pengunduran diri perlu proses. Semua bisa selesai paling tidak sebelum proses seleksi di Pansel Capim KPK selesai," kata Johan.

Johan mengatakan bahwa dirinya akan mengajukan pengunduran diri ke pimpinan DPR yang dilanjutkan ke PDIP. "Pertama surat ke pimpinan DPR. Baru nanti ke partai. Soalnya mundur dari DPR, kan, perlu proses," ujar Johan. (Can/Fah/Try/X-7)